

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Stevanus (2018) berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada” bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ambengan telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan, seperti pengelolaan jalur trekking air terjun, penyediaan homestay, serta pelestarian lingkungan. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih belum merata karena sebagian warga kurang memahami manfaat ekonomi dari pengembangan desa wisata, sehingga tingkat keterlibatan mereka masih rendah pada aspek perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Penelitian oleh Aulia Rizki Nabila & Tri Yuniningsih (2016) yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan karena Desa Wisata Kandri memiliki potensi besar tetapi tingkat partisipasi masyarakat tidak merata. Sebagian masyarakat aktif terlibat, sementara yang lain masih pasif. Metode Penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif, dengan informan ketua Pokdarwis dan warga. Teknik sampling menggunakan snowball sampling, hasil data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam beberapa kegiatan wisata seperti membantu saat acara, memberikan ide, dan ikut dalam musyawarah atau pertemuan warga. Namun, manfaat dari pengembangan desa wisata ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Karena itu, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Kandri masih termasuk partisipasi semu, yaitu masyarakat terlibat tetapi belum semuanya mendapat manfaat yang sama. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya sudah masuk kategori tingkat tinggi (citizen power) karena masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, bekerja sama dengan Pokdarwis, serta ikut mengendalikan kegiatan wisata. Ada beberapa faktor yang mendorong partisipasi seperti pengetahuan masyarakat, budaya lokal, serta dukungan pemerintah dan Pokdarwis. Namun, ada juga faktor penghambat seperti kesibukan pekerjaan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya inovasi dalam pelatihan dari pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat diberi kesempatan untuk berperan aktif, sekaligus apakah manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga.

3. Penelitian oleh Alya (2023) Yang berjudul “ Studi Literatur Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kota Surabaya” . Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata budaya di kota-kota besar. Surabaya sebagai kota sejarah memiliki potensi budaya yang beragam, namun pengembangannya belum optimal karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menghimpun dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait peran masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata, terutama pada tahap identifikasi potensi, perencanaan program, implementasi kegiatan, hingga proses evaluasi. Keterlibatan masyarakat terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi, memperkuat identitas budaya lokal, dan mendorong keberlanjutan wisata
4. Penelitian oleh Wibowo et al. (2023) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan” menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pariwisata. Bentuk partisipasi tersebut meliputi keterlibatan dalam

penyusunan rencana pengembangan wisata, kontribusi tenaga maupun pemikiran dalam kegiatan wisata, serta pengawasan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial di destinasi wisata. Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi yang kuat akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program wisata serta meningkatkan keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sumber data digunakan merupakan data sekunder, Peneliti menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) dan data sekunder. dari beberapa literatur yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

5. Penelitian oleh Maulana *et al.*, (2023) yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat Desa Pedawang dalam Pengembangan Wisata Sipare Karanganyar Kabupaten Pekalongan” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata desa. dengan fokus pada aspek-aspek seperti keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan wisata. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika partisipasi masyarakat di Desa Pedawang, yang memiliki

potensi wisata serupa dengan destinasi pedesaan lainnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tercermin tergolong cukup baik, terutama dalam bentuk partisipasi dan tenaga dan pemikiran, di mana masyarakat aktif berkontribusi melalui penyediaan tenaga kerja, ide-ide inovatif, serta saran untuk pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Tabel 2.1 Relevansi Penelitian

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wibowo et al., (2023)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Partisipasi Masyarakat Diperlukan pada seluruh tahapan pengembangan pariwisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna meningkatkan	Sama sama membahas partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Penelitian ini bersifat kajian literatur, sedangkan Penelitian penulis bersifat kualitatif deskriptif

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			keberhasilan pariwisata berkelanjutan		
2	Aulia & Tri Yuningsih (2016)	Analisis partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Semarang	Partisipasi masyarakat sudah terjadi dalam kegiatan wisata, namun belum merata dan manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat	Sama-sama mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata	Lokasi dan Objek Penelitian berbeda dengan penelitian penulis
3	Alya (2023)	Studi literatur Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Strategi Pengembangan	Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas	Sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam	Fokus penelitian pada pariwisata budaya perkotaan,

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pariwisata Budaya di Kota Surabaya	perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan pariwisata budaya	pembangunan pariwisata	bukan pada wisata alam desa
4	Edison (2018)	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Ambengan Kecamatan Sukasada	Masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan kegiatan wisata, namun belum sepenuhnya merata terutama pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan	Sama-sama mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata	Penelitian ini dilakukan pada desa wisata yang telah berjalan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembangunan wisata alam yang masih

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					dalam tahap pengembangan
5	Riyan Maulana dkk. (2025)	Partisipasi masyarakat Desa Pedawang dalam pengembangan Wisata Sipare Karanganyar Kabupaten Pekalongan	Partisipasi masyarakat terlihat dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan wisata desa namun, partisipasi dalam bentuk dukungan material masih terbatas	Sama-sama menyoroti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa	Penelitian ini dilakukan pada pengembangan wisata desa yang telah berjalan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata alam

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					yang masih dalam tahap pengembangan

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan wisata, namun penelitian sebelumnya lebih berfokus pada desa wisata yang telah berkembang dan belum mengkaji bentuk partisipasi masyarakat pada wisata alam desa yang masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Wisata Riam Bidadari di Desa Lumbang Kecamatan Muaraya Kabupaten Tabalong sebagai upaya mengisi celah penelitian yang ada.

B. Landasan Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang kajian yang membahas bagaimana pemerintah mengelola urusan publik guna mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya

dipahami sebagai aktivitas birokrasi, tetapi sebagai suatu proses yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Keban (2014), administrasi publik adalah seluruh proses penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Dalam perspektif yang lebih luas, administrasi publik berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan sumber daya publik agar dapat digunakan secara efektif dan adil. Hal ini berarti bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada prosedur dan struktur pemerintahan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dan program pemerintah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik memiliki peran strategis dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan sektor pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa wisata, seperti Wisata Riam Bidadari di Desa Lumbang, administrasi publik berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak semata-mata bersifat top-down, melainkan diharapkan bersifat partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

2. Paradigma administrasi

Paradigma administrasi publik merupakan cara pandang yang mencakup seperangkat nilai, prinsip, metode, dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diyakini dan dianut oleh masyarakat pada periode waktu tertentu (Thomas Kuhn, 2014). Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritis dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Perkembangan administrasi publik tidak terlepas dari perubahan kebutuhan masyarakat dan kompleksitas permasalahan publik. Menurut Thomas Kuhn (1993) melalui karyanya yang berjudul “Peran paradigma dalam Revolusi Sains” mengungkapkan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Inu Kencana Syafie (1999) menganggap bahwa paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya, fokus mempersoalkan apa kajian atau cara bagaimana memecahkan persoalan. Sedangkan locus mempersoalkan dimana lokasi penerapan suatu ilmu pengetahuan. Denhardt dan Denhardt (2003) mengungkapkan bahwa terdapat empat perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS), dan *New public governance* (NPG).

- a. *Model Old Public Administration (OPA)* atau Administrasi Publik Klasik merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya pemerintah dalam melaksanakan tindakan administrasi secara demokratis, efisien, dan efektif, dengan tujuan memastikan proses tersebut bebas dari manipulasi kekuasaan dan intervensi yang tidak sah. memberikan perhatian pada bagaimana pemerintah melakukan tindakan administrasi secara demokratis, efisien dan efektif, serta bagaimana pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil (Thoha, 2017). Fokus perhatiannya pada interaksi dan kerjasama di dalam organisasi pemerintah yang dibangun melalui hirarki. Model ini memberikan peran yang sangat besar kepada pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun penyampaian pelayanan publik. OPA berakar pada prinsip-prinsip birokrasi Weberian yang menekankan hirarki, aturan baku, dan pembagian kerja yang jelas. Model ini berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, bukan pada keterlibatan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat dipahami hanya sebagai penerima manfaat.
- b. *New Public Management (NPM)* merupakan pendekatan reformasi dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20, yang menekankan penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis ke sektor publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Osborne dan

Gaebler, 1992). Organisasi publik diidentikan dengan tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif serta miskin inovasi. Oleh karena itu timbullah suatu gerakan untuk melakukan reformasi terhadap manajemen sektor publik. NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi serta privatisasi perusahaan publik. Karakteristik utama NPM adalah perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi kepada kepentingan publik. Hal lain yang mendukung bahwa peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik adalah kenyataan bahwa prinsip ekonomi dan efisiensi tidak selalu dapat diterapkan pada semua aktivitas pemerintah (misalnya fasilitas sosial dan fasilitas umum). Modern government tidak hanya mencakup efisiensi dan ekonomis, tapi juga merupakan hubungan akuntabilitas antara negara dengan warga negara, dimana warga negara tidak diberlakukan hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar dan

menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dilakukan (Minogue, 1998). Perspektif NPM memperoleh kritik keras dari banyak pakar. Mereka memandang bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif Old Public Administration, tidak hanya membawa teknik administrasi baru namun juga seperangkat nilai tertentu. Masalahnya terletak pada nilai-nilai yang dikedepankan tersebut seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas dan bisnis karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi.

- c. *New Public Service / (NPS)* merupakan teori manajemen publik yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak antara warga negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elite politik seperti yang tertera dalam aturan. Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma NPS yaitu pelayanan publik yang harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Meskipun NPS merupakan paradigma yang sangat ideal dilihat dari aspek keadilan yang memungkinkan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraannya misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, namun hal tersebut sangatlah sulit dilakukan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan

adanya keterbatasan dalam sumber daya terutama finansial yang dimiliki suatu negara, sehingga tidak semua warga negara dapat mengakses pelayanan publik tanpa mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi terutama di negara berkembang seperti Indonesia adalah perwujudan dari paradigma New Public Management dimana pemerintah menyediakan pelayanan publik, dengan syarat harus ada pengorbanan finansial dari warga negara sebagai pengguna pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dikategorikan ke dalam paradigma (NPS) karena fokus pada pelayanan publik yang lebih responsif, transformatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Paradigma NPS menekankan kolaborasi antara pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pelayanan publik. NPS juga merupakan salah satu sistem yang berusaha memperbaiki kinerja birokrasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam memperbaiki kinerja birokrasi. yang menawarkan ruang bagi keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam mereformasi kinerja birokrasi. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, keterlibatan masyarakat seperti yang ditawarkan oleh NPS harus dilihat dalam konsep interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam merubah kebudayaan dan pola pikir negatif yang telah membentuk kultur negatif dalam kinerja birokrasi.

d. *New Public Governance (NPG)* merupakan paradigma yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi dan kerja sama antar pihak

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpijak pada paradigma *New Public Service (NPS)* yang menempatkan masyarakat sebagai warga negara aktif dan mitra pemerintah dalam proses pembangunan, khususnya dalam pembangunan wisata berbasis partisipasi masyarakat.”

3. Dimensi Administrasi Publik

Dimensi Administrasi Publik didefinisikan sebagai proses pengelolaan urusan publik oleh pemerintah, yang melibatkan perencanaan, organisasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menyelenggarakan kekuasaan, pelayanan, dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memahami administrasi publik secara utuh, para ahli mengembangkan berbagai dimensi atau aspek yang menggambarkan bagaimana proses pemerintahan dijalankan. Menurut Woodrow Wilson dalam esainya "*The Study of Administration*" (1887), Administrasi Publik adalah seni dan ilmu yang mengelola urusan negara secara efisien. Definisi

ini telah berkembang, dengan penekanan pada aspek demokratis dan partisipatif. dalam konteks modern, Administrasi Publik tidak hanya tentang birokrasi, tetapi juga tentang inovasi dan responsivitas terhadap perubahan sosial. Menurut Keban (2014), administrasi publik tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai dimensi penting yang saling terhubung. Dalam bukunya “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik” Keban menjelaskan bahwa administrasi publik terdiri atas enam dimensi kunci yang berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana pemerintah merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dimensi-dimensi tersebut mencakup :

a). Dimensi Kebijakan Publik

Dimensi Kebijakan Publik merupakan dimensi paling fundamental karena menjadi dasar segala tindakan pemerintah. Dimensi ini menekankan perumusan dan implementasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, memastikan bahwa keputusan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Osborne dan Gaebler (1992) "Pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mampu mendelegasikan kekuasaan kepada masyarakat, bukan hanya mengontrol dari atas." Kutipan ini menunjukkan perspektif alternatif yang menekankan desentralisasi, Keban menekankan bahwa kebijakan publik adalah “arah tindakan”

yang sengaja dipilih pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat. Menurut buku kamus administrasi publik (Chandler dan Plano, 1988:107) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

b). Dimensi Manajemen

Dimensi Manajemen merujuk pada pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya dan proses dalam sektor publik guna mencapai tujuan pembangunan yang efisien dan inovatif. Dimensi ini menekankan penerapan teknik manajemen modern, yang diadopsi dari praktik bisnis, untuk meningkatkan produktivitas, responsivitas, dan kualitas layanan publik, berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. menekankan implementasi berupa penerapan model, teori, metode , teknik, serta cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Penekanan pada aspek pelaksanaan ini tercermin dari definisi manajemen yang di Sampang oleh Mary Parker Follett dalam bukunya “ *Creative Experience*” tahun 1944 yaitu manajemen sebagai “ suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain”. Definisi tersebut

mengandung beberapa elemen penting yaitu “Manajemen sebagai suatu proses kerjasama yang mengandalkan sinergisme” Proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pemimpin, kerja sama dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji .

c). Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi Struktur Organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi publik , karena berkaitan dengan peraturan pembagian tugas, wewenang. Dan tanggung jawab antarindividu maupun unit kerja dalam suatu organisasi. Menurut Handoko (2011) struktur organisasi adalah kerangka formal yang menggambarkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk memperjelas kedudukan, hubungan kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan formal yang menggambarkan bagaimana aktivitas kerja dibagi, dikoordinasikan, serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi

d). Dimensi Etika

Dimensi Etika adalah aspek atau sudut pandang yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, norma, dan prinsip tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan,

keputusan, atau perilaku sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, profesi, atau individu. Dimensi etika membantu seseorang atau organisasi dalam mempertimbangkan dampak moral dari setiap keputusan, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan adanya dimensi etika, suatu tindakan tidak hanya dinilai dari segi hukum atau keuntungan, tetapi juga dari segi moralitas dan nilai kemanusiaan.

e). Dimensi Lingkungan

Dimensi Lingkungan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam administrasi publik, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak pernah berlangsung dalam ruang yang kosong, dimensi ini menekankan bahwa pemerintah tidak dapat merancang dan melaksanakan kebijakan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi lokal.

f) . Dimensi Kinerja

- . Dimensi Kinerja merupakan dimensi yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan administrasi publik dan pelaksanaan program pembangunan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga mencakup bagaimana proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, responsif, dan akuntabel kepada masyarakat.

Dengan merujuk pada dimensi administrasi publik, penelitian ini menempatkan pembangunan wisata sebagai proses administrasi yang

menuntut perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas publik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata Riam Bidadari dipahami sebagai wujud implementasi dimensi administrasi pembangunan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan dimensi administrasi publik tersebut, pembangunan wisata Riam Bidadari di Desa Lumbang dapat dipahami sebagai bagian dari praktik administrasi pembangunan yang menuntut adanya kebijakan yang jelas, pengelolaan kelembagaan yang baik, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata bukan hanya aktivitas sosial semata, melainkan merupakan wujud berfungsinya dimensi administrasi publik dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, dimensi administrasi publik menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana keterlibatan masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan wisata berbasis masyarakat.

4. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup perubahan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Pembangunan bersifat kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan sosial, kelembagaan, budaya, serta peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan dipahami sebagai suatu proses yang dirancang secara sadar dan sistematis oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional, di samping percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator ekonomi, melainkan harus memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, pembangunan harus berorientasi pada manusia, di mana masyarakat menjadi subjek sekaligus tujuan utama pembangunan. Pembangunan tidak bersifat spontan, melainkan memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, pembangunan menuntut adanya peran aktif pemerintah sebagai penggerak, sekaligus keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan. Dalam konteks administrasi pembangunan, pembangunan dipahami sebagai bagian dari fungsi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian (2005), administrasi pembangunan menekankan pada kemampuan aparaturnegara dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Menurut Ndraha (1990:72) : "Pembangunan masyarakat dapat dipandang dari sudut luas dan dapat dipandang dari sudut arti sempit". Pembangunan masyarakat dalam arti luas dapat dikemukakan sebagai perubahan sosial terencana dan yang menjadi sasaran pembangunan masyarakat adalah perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi termasuk sosial dan politik. Sedangkan dalam arti sempit, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial terencana di lokalitas tertentu, misalnya desa dan kota.

Dalam konteks administrasi publik dan pembangunan daerah, teori peran pembangunan membahas bagaimana pembangunan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi, dan mengembangkan potensi lokal. Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proses fisik, tetapi juga proses sosial, ekonomi, dan kultural yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Menurut Todaro (2000:17), pembangunan memiliki tiga nilai inti, yaitu kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas pilihan hidup manusia. Todaro menyatakan "Pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi

nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi” Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam perspektif administrasi pembangunan, strategisnya peran pembangunan dijelaskan oleh Siagian (2005:32) yang menyatakan bahwa pembangunan berfungsi sebagai usaha terarah dan berkesinambungan untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik. Siagian menekankan bahwa “Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.” Artinya, pembangunan harus dipahami sebagai upaya yang sistematis dan memanfaatkan seluruh potensi daerah, termasuk potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Chambers (1997) “Pembangunan harus mendorong masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan sendiri, mengorganisasi tindakan sendiri, dan mengelola sumber daya sendiri.” Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas atau objek wisata, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, mampu mengambil keputusan, dan berdaya secara sosial dan ekonomi. dalam konteks dan teori peran pembangunan ini sangat relevan karena pembangunan wisata menjadi instrumen untuk :

- a) meningkatkan pendapatan masyarakat desa
- b) memperluas peluang usaha
- c) menciptakan ruang partisipasi

- d) memperkuat identitas budaya lokal
- e) meningkatkan kapasitas masyarakat
- f) Membangun kelembagaan Pokdarwis dan menjaga potensi alam

5. Partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu proses pembangunan. Menurut Suprayogi (2011) Partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi yang dikemukakan oleh Fasli dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dapat diartikan sebagai pembuat keputusan, menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa .

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Suryono (2011:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.

- b. partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksana-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi Masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan warga dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Josef (2002: 114) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Midgley dalam Khairul Muluk (2007:51) Menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dikatakan berhasil apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat sendiri setelah semua dukungan eksternal berakhir. Untuk melihat bentuk dan tahapan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan , diperlukan suatu model atau kerangka analisis yang mampu menggambarkan bagaimana masyarakat terlibat dalam setiap proses pembangunan.

Salah satu model yang banyak digunakan adalah model partisipasi Cohen dan Uphoff . Model Partisipasi Cohen & Uphoff (1980) merupakan dua tokoh penting dalam kajian pembangunan pedesaan dan partisipasi masyarakat. Model mereka banyak dikutip dalam literatur perencanaan pembangunan karena memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana masyarakat seharusnya terlibat dalam seluruh tahapan program pembangunan. Model ini menjelaskan bahwa partisipasi tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan saja, tetapi harus hadir sejak proses perencanaan hingga evaluasi. Cohen & Uphoff mengembangkan model partisipasi yang berfokus pada empat tahapan utama yaitu :

- a) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Masyarakat dilibatkan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan dan pengambilan keputusan penyampaian pendapat.
- b) Partisipasi dalam Pelaksanaan. Meliputi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pembangunan fasilitas wisata, dan pemberian jasa wisata.
- c) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil. Manfaat yang diterima dapat berupa peningkatan pendapatan, peluang usaha kecil, dan penguatan nilai sosial budaya.

- d) Partisipasi dalam Evaluasi. Dimana Masyarakat turut menilai keberhasilan suatu program, dampak sosial-lingkungan, efektivitas kegiatan wisata, dan perbaikan ke depan. Bentuk partisipasi evaluatif dalam wisata desa dapat berupa pertemuan rutin Pokdarwis bersama masyarakat, pengumpulan masukan dari pengunjung dan warga, pengawasan terhadap fasilitas wisata, laporan keuangan pengelolaan wisata yang disampaikan secara transparan, penilaian dampak wisata terhadap lingkungan dan sosial budaya. Evaluasi yang melibatkan masyarakat menciptakan transparansi dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa. Model ini digunakan dalam penelitian untuk kedalaman partisipasi masyarakat Desa Lumbang dalam pembangunan wisata.

Dari teori diatas penulis mencantumkan beberapa teori tentang partisipasi dan partisipasi masyarakat. Penulis mencantumkan teori tersebut dikarenakan, teori tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan wisata riam bidadari di desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

6. Pariwisata desa berbasis masyarakat (*Community Based Tourism/ CBT*) merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata.

Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima dampak dari aktivitas pariwisata, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan serta pengendalian terhadap pengembangan kegiatan wisata di wilayahnya. Pendekatan ini menekankan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengawasan kegiatan pariwisata yang berkembang di wilayahnya. CBT memandang masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman sosial, serta kepentingan langsung terhadap keberlanjutan sumber daya wisata yang dimiliki (Murphy, 1985). Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang hidup berdampingan dengan destinasi wisata dan secara langsung merasakan dampak dari kegiatan pariwisata yang dikembangkan (Tosun, 2006). CBT juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam pengembangan pariwisata. Melalui keterlibatan masyarakat, pengembangan wisata diharapkan mampu menjaga kearifan lokal, memperkuat identitas budaya, serta membangun rasa memiliki terhadap destinasi wisata. Rasa memiliki tersebut mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan wisata, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada kepentingan

ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan (Goodwin & Santilli, 2009).

Dalam konteks pembangunan wisata alam berbasis desa, CBT menjadi pendekatan yang relevan karena pengelolaan destinasi wisata sangat bergantung pada peran masyarakat setempat. Masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan wisata melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti keterlibatan dalam perencanaan kegiatan wisata, pelaksanaan aktivitas wisata, pengelolaan fasilitas pendukung, serta upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan wisata. Partisipasi masyarakat dalam kerangka CBT juga mencerminkan adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Penerapan konsep CBT dalam pembangunan wisata Riam Bidadari di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya, menunjukkan pentingnya peran masyarakat sebagai penggerak utama dalam pengembangan destinasi wisata. Masyarakat desa memiliki peran dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, menjaga kelestarian kawasan wisata, serta mendukung kegiatan wisata yang berkembang di wilayah tersebut. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip CBT, pembangunan wisata Riam Bidadari diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu,

kajian mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan wisata Riam Bidadari menjadi penting untuk memahami bagaimana keterlibatan masyarakat terwujud dalam praktik pembangunan pariwisata desa berbasis masyarakat.

Konsep pariwisata desa berbasis Community Based Tourism (CBT) tidak dapat dipisahkan dari prinsip pariwisata berkelanjutan, karena keduanya sama-sama menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut UNWTO (2015), pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh, baik untuk masa kini maupun masa depan. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai sosial budaya masyarakat lokal, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat.

penerapan pariwisata berkelanjutan sangat penting karena sebagian besar potensi wisata berada pada sumber daya alam dan budaya yang rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, pengelolaan

wisata harus dilakukan secara bijaksana dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan wisata, karena masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga lingkungan, melestarikan budaya, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara merata.

Selain itu, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan juga mendorong adanya keseimbangan antara kepentingan wisatawan dan masyarakat lokal. Wisata tidak hanya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan, nilai, dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan wisata tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan, melainkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat.

7. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata merupakan landasan dalam pengembangan dan pengelolaan kegiatan wisata agar berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilakukan secara partisipatif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal.

Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Selain itu, kebijakan pariwisata juga diperkuat oleh peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan dan pengembangan potensi wisata sesuai dengan kondisi lokal. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan budaya lokal.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1. diagram kerangka Konseptual

